

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN PUCUK RANTAU
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018**

Halimah Rusdah

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan
Singingi, Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi
halimahrusdah@gmail.com

Abstract

This research was conducted in relation to the accountability of management of village fund allocation in 2018 in the large river village of pucuk rantau district subdistrict I was singingi. The purpose of this study was to find out the accountability of the management of village fund allocations carried out by the large river village of pucuk rantau district subdistrict I was singingi. So that problem regarding the management of village fund allocation can be proven and explained whether the large river village government in achieving its work has been running in accordance with the planning or initial objectives effectively and efficiently. Data analysis techniques used in this study are qualitative descriptive analysis with the process of transforming research data in the form of descriptions and tabulations. Based on the results of the study, it can be concluded that the accountability of managing village fund allocation in the large river village of pucuk rantau district subdistrict I was singingi for the year 2018 the result was not good with the number of 6 indicators assessed as not good. Because some things are that the community is not participating in the management of village fund allocation, the lack of human resources of the village government in the preparation of the APBDes financial report and the achievement of the work of the village government is not good. Therefore the village government must improve the quality of village funds so that community satisfaction can increase.

Key Words: Accountability, for managing village, fund allocation.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dibuktikan dan dijelaskan apakah Pemerintah Desa Sungai Besar dalam pencapaian kerjanya telah berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk uraian dan tabulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 hasilnya kurang baik Dengan jumlah 6 indikator dinilai tidak baik. Dikarenakan beberapa hal yaitu masyarakat kurang ikut berpartisipasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, kurangnya Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa dalam pembuatan laporan keuangan APBDes dan pencapaian kerja Pemerintah Desa Kurang baik. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Dana Desa agar kepuasan masyarakat dapat meningkat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Di dasarnya pada Minimnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam mengelola laporan keuangan dana Desa, rendahnya tingkat pendidikan pemerintah desa dan yang paling tinggi adalah tamatan SMA, keterbatasan sarana dan prasarana, masyarakat kurang berpartisipasi dalam musyawarah desa sehingga mereka kurang merasakan dari pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut, pemerintah desa kurang dalam mengelola dan manajemen keuangan anggaran dana desa dan alokasi dana desa sehingga terjadilah defisit anggaran atau kekurangan uang kas. Selain itu juga hasil pencapaian kerja kurang maksimal dikarenakan sumber daya manusia pemerintah desa sungai besar kurang dalam mengelola keuangan desa dan penyelesaian kerja pemerintah desa belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dikarenakan salah satu kendalanya adalah pembayaran pajak yang belum dibayar sehingga penyelesaian laporan keuangan APBDes belum sesuai pada waktu yang ditentukan.

Pada tahun 2017 Desa Sungai Besar menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 238.075.000,- dan pada tahun 2018 Desa Sungai Besar menerima Alokasi Dana Desa lebih besar dibandingkan tahun 2017. Tahun 2018 Desa Sungai Besar menerima Alokasi Dana Desa Sebesar Rp. 433.856.000,-. Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Besar yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu untuk penghasilan tetap perangkat Desa dan operasional serta untuk perlengkapan kantor desa (Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Besar Pada Hari Kamis, Tanggal 8 November 2018, 14:30 wib).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) salah satu faktornya adalah dilihat dari tingkat pendidikan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumber Daya Manusiannya (SDM) yang paling tinggi adalah tamatan SMA. Selain itu kurangnya penggunaan Alokasi Dana Desa yang berdaya guna.

Anggaran pendapatan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Besar berjumlah Rp. 433.856.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang pemberdayaan masyarakat dan total jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 463.856.000,-. Dapat dilihat bahwa pengeluaran lebih besar dari pendapatan sehingga terjadi defisit atau kekurangan uang kas. Selain itu didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa penggunaan Alokasi Dana Desa di bagi menjadi 2 yaitu untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa 30% dari total keseluruhan Alokasi Dana Desa dan biaya pemberdayaan masyarakat 70% dari total keseluruhan Alokasi Dana Desa. Namun dapat kita lihat pada tabel 1.4 tersebut bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa lebih dari 30% dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kurang dari 70%. Oleh sebab itu pemerintah desa sungai besar kurang dalam mengelola dan manajemen anggaran keuangan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk oleh Desa Sungai Besar, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategi dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

Menurut Hayat (2017:121-124) Nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas pelayanan. Sebaik apaun penyelenggaraan pelayanan, tanpa di ikuti akuntabilitas kinerja aparatur, maka pelayanan tersebut tidak akan membuahkan produktivitas dan kualitas kinerja. Baik bagi diri aparatur belum tentu berdampak baik pula terhadap pelayanan. Akuntabilitas berkaitan dengan ketentuan atau peraturan perundangundangan. Pelayanan yang menabrak aturan sekalipun dilakukan secara baik akan berdampak buruk terhadap kinerja pegawai, kualitas pelayanan dan terdapat tindakan korupsi di dalamnya. Menurut Hayat (2017:121) ada lima prinsip dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, yaitu:

1. Ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas;

Selain prinsip-prinsip akuntabilitas diatas, ada beberapa konsep *good governance* menurut Hayat (2017:185-199) dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan diantaranya:

1. Pengawasan

Pengawasan menjadi kontrol terhadap kinerja aparatur. Dengan sistem penilaian kinerja terhadap aparatur, menjadi bagian dari pengawasan di pemerintahan. Pengawasan juga suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

2. Efisien dan efektif

Efisien merupakan bentuk pencapaian yang maksimal terhadap hasil kerja dengan penggunaan sumber daya minimal. Sumber daya dapat dilakukan seminimal mungkin dengan pencapaian hasil kerja yang maksimal adalah bentuk kinerja yang efisien. Sedangkan efektif adalah bentuk daya guna dan tepat guna dari apa yang sudah dilakukan. Berdaya guna adalah suatu yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan secara kualitas. Daya guna lebih kepada kualitas *output* yang dihasilkan dari kinerja aparatur. Sementara tepat guna adalah penyelesaian terhadap pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan presentasi anggaran:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa, operasional pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong;

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2017:214) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian di analisis dengan kata-kata yang melat arbelakangi responden berperilaku seperti: direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yaitu dari teknik wawancara, teknik dokumentasi serta teknik observasi. Teknis analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, tahap pengujian data, dan tahap analisa data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Indikator Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

No	Indikator	Item Penilaian
1	Komitmen	Kurang Baik
2	SDM	Kurang Baik
3	Tujuan dan Sasaran	Kurang Baik
4	Transparan	Kurang Baik
5	Pengawasan	Kurang Baik
6	Efisien dan Efektif	Kurang Baik

Sumber: Data Olahan Lapangan 2018

Rekapitulasi terhadap indikator tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Komitmen yang dijadikan indikator penilaian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 mendapat jawaban kurang baik, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:
 - a. Dari hasil wawancara informan mengatakan bahwa mereka dalam konsistensi pembuatan Laporan Keuangan APBDesa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Anggaran Dana Desa. Namun dilihat dari hasil dokumentasi apa yang

mereka katakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Dana Desa yaitu dalam Skala Prioritas yang ditetapkan di tingkat desa diantaranya 30% untuk biaya belanja penyelenggaraan Pemerintah Desa dari total keseluruhan Alokasi Dana Desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah tidak Komitmen atau Konsistensi dalam pembuatan Laporan Keuangan APBDesa di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

2. SDM yang dijadikan indikator penilaian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 mendapat jawaban kurang baik, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:
 - a. Dari hasil wawancara informan mengatakan bahwa mereka kurang memahami dalam pembuatan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi hal ini di karenakan kurangnya Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa yang ahli dalam bidang pembuatan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Besar. Jika dilihat dari tingkat pendidikan Pemerintah Desa yang paling tinggi adalah tamatan SMA/SLTA sehingga mereka kurang memahami dan kesulitan dalam pembuatan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih lagi setiap tahun ketahun aplikasi untuk membuat Laporan Keuangan APBDesa tersebut selalu berubah-ubah sehingga Pemerintah Desa kesulitan untuk memahami dalam pembuatan Laporan Keuangan tersebut.
3. Tujuan dan Sasaran yang dijadikan indikator penilaian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 mendapat jawaban kurang baik, sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yaitu:
 - a. Dari hasil wawancara informan mengatakan bahwa mereka untu kepuasan masyarakat terhadap penggunaan Anggaran Dana Desa tersebut bahwa Pemerintah Desa menfokuskan pada fisik infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada hasil pengamatan peneliti untuk pembangunan fisik infrastuktur kurang berjalan dengan baik. Hal ini peneliti melihat untuk pembangunan jalan semenisasi tidak terlihat dimana pembangunan jalan tersebut dilaksanakan, karena dapat peneliti rasakan sendiri bahwa jalan di Desa Sungai Besar tersebut banyak yang rusak dan tidak ada terlihat untuk perbaikan jalan. Padahal jalan tersebut adalah sarana transportasi untuk masyarakat beraktivitas, jika jalan tersebut tidak nyaman untuk masyarakat bagaimana masyarakat tersebut akan sejahtera. Apalagi hari sudah hujan akan sangat menyulitkan masyarakat selain itu untuk anak sekolah akan kesulitan untuk pergi sekolah dikarenakan jalan yang becek dan juga licin.
4. Transparan yang dijadikan indikator penilaian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 mendapat jawaban kurang baik, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:
 - a. Dari hasil wawancara informan bahwa mereka mengatakan untuk menyampaikan informasi tentang Anggaran Dana Desa Dengan mengadakan musyawarah desa sehingga masyarakat mengetahui tentang anggaran Alokasi Dana Desa. Namun dari hasil pengamatan peneliti bahwa Pemerintah Desa kurang Transparan atau terbuka kepada masyarakat terkait Anggaran Dana Desa tersebut. Dikarenakan dari hasil dokumentasi Pemerintah hanya memberi informasi kepada masyarakat berupa pendapatan yang diterima oleh Desa Sungai Besar, namun tidak memberikan

informasi berapa anggaran yang dikeluarkan dan untuk apa saja anggaran itu digunakan. Keterbukaan itu sangat penting juga untuk kejujuran kita sebagai Pemimpin. Karena setiap warga negara mempunyai hak mengetahui segala bentuk informasi yang menjadi konsumsi publik. Informasi harus diberikan secara jelas oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dengan berbagai media sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat terhadap tindakan dan keputusan penyelenggara Pemerintah Desa.

5. Pengawasan yang dijadikan indikator penilaian terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 mendapat jawaban kurang baik, sesuai hasil wawancara dan observasi yaitu:

a. Pada hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan bahwa mereka dalam mengawasi Penggunaan Anggaran Dana Desa tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Dana Desa yaitu tim pelaksana kegiatan menyampaikan kepada Kepala Desa laporan secara berkala (bulanan atau triwulan) yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang disertai data rinci tenaga kerja beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan pembangunan desa. Namun dari hasil pengamatan peneliti, peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa dan BPD kurang dalam hal pengawasan dikarenakan peneliti tidak pernah melihat adanya Hari Orang Kerja (HOK) untuk pembangunan di Desa Sungai Besar tersebut, selain itu peneliti tidak melihat pemasangan Nama pada hasil kerja kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu peneliti mengatakan indikator pengawasan hasilnya kurang baik.

6. Efisien dan Efektif yang dijadikan indikator penilaian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 mendapat jawaban kurang baik, sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yaitu:

a. Dari hasil wawancara bahwa hasil pencapaian kerja pemerintah desa sungai besar belum maksimal. Dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan alokasi dana desa tersebut dan yang paling tinggi adalah tamatan SMA. Jika sumber daya manusianya lebih ditingkatkan lagi besar kemungkinan hasil pencapaian kerja akan berjalan dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting yang ada dalam organisasi. Produktivitas setiap sumber daya manusia dipengaruhi banyak faktor sehingga kontrol terhadap ketersediaan sumber daya aparatur menjadi penting untuk dilakukan secara periodik. Faktor rendahnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah profesionalitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Profesionalitas dan akuntabilitas menjadi komponen penting bagi penyelenggara pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga dari jawaban informan pada rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa jawaban tertinggi dari indikator dalam menilai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dinilai tidak baik dengan jumlah 6 indikator dinilai kurang baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 tidak baik dan

masih perlu ditingkatkan lagi agar kualitas penyelenggaraan Dana Desa dan Kepuasan masyarakat dapat meningkat.

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya dilihat dari laporan keuangan APBDes tapi dilihat juga dari pengelolaannya yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sehingga tercapailah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara, melalui hasil dokumentasi dan melalui hasil observasi terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dapat dinilai tidak baik. Dengan jumlah 6 indikator dinilai kurang baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor UNIKS beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi dan Jajarannya.
2. Bapak Zul Ammar SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi beserta Staf dan Jajarannya.
3. Bapak Desriadi S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Emilia Emharis S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Rika Ramadhanti S.Ip.,M.Si selaku dosen Penasehat Akademik penulis
6. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial Khususnya Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebbaikannya mendapat balasan disisi Allah SWT.
7. Untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta, tiada kata yang dapat diucapkan selain terimakasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan usia yang penuh keberkahan dan membalas segala kebaikan kalian.
8. Untuk Subertamiko yang selalu memberikan dukungan serta selalu memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Untuk rekan-rekan dan teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial Khususnya Program Studi Administrasi Negara Kelas E Universitas Islam Kuantan Singingi yang sudah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andri, Alsar dan Khotami. 2018. *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish

Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember

Diah Purnamasari. 2017. *Peraturan Lengkap Desa*. Jakarta: Sinar Grafika

- Haw Widjaja. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Haryanto, Tri. 2007. *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: cempaka putih
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kumorotomo, Wahyudi. 2014. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Maman dan Sambas. 2011. *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Numan. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali. Pers
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Pres
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Administrasi Nagara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visi Media
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2012. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Agung
- Usman, Husaini, dan Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Peraturan Menteri:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jurnal:

Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Duplikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.

Inernet:

[Http://www.pnri.go.id/Pedoman-perbaikan-pedoman-penyusunan-pelaporanakuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintahan.pdf](http://www.pnri.go.id/Pedoman-perbaikan-pedoman-penyusunan-pelaporanakuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintahan.pdf).

[Http://www.inspektorat.bogorkab.go.id](http://www.inspektorat.bogorkab.go.id).